



The Effectiveness of The Role of The School Committee in SD Negeri 1 Maibua

Efektivitas Peran Komite Sekolah di SD Negeri 1 Maibua

Jepri Utomo¹, Inayatul Mutmainnah²

¹Universitas Madako Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia

²Universitas Pepabri Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

¹jepriutomo1@gmail.com, ²inayasosiologi@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the effectiveness of the role of the School Committee in SD Negeri 1 Maibua. This study uses a descriptive type survey method. The population is heterogeneous, and the sampling was done by purposive sampling. Types of data in the form of qualitative and quantitative. The data sources are primary and secondary. Three data collection techniques were used, namely: questionnaires, interviews, and observations. The data that has been collected is then analyzed descriptively qualitatively, namely by grouping the data by categorization and then each category is given a percentage weight according to the existing events. The findings show that the role of the School Committee in SD Negeri 1 Maibua is quite effective.

keywords: *effectiveness, role, school committee*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas peran Komite Sekolah di SD Negeri 1 Maibua. Penelitian ini menggunakan metode survey tipe deskriptif. Populasi bersifat heterogen, dan penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling. Jenis data berupa kualitatif dan kuantitatif. Adapun sumber data adalah primer dan sekunder. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: kuesioner, wawancara, dan observasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mengelompokkan data secara kategorisasi dan selanjutnya masing-masing kategori diberi bobot persentase sesuai dengan kejadian yang ada. Hasil temuan menunjukkan bahwa peran Komite Sekolah di SD Negeri 1 Maibua cukup efektif.

kata kunci: efektivitas, peran, komite sekolah

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pendidikan Nasional merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan Negara yang sangat urgen. Pentingnya pendidikan ini karena menyangkut masa depan bangsa dan negara serta individu itu sendiri. Termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut mutlak

diselenggarakan pendidikan bagi masyarakat, baik yang bersifat pendidikan sekolah dengan segala jenjang pendidikan maupun pendidikan luar sekolah. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan, antara lain adalah penyempurnaan Sistem Pendidikan Nasional. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan karena Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan, kesempatan



pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional kerap menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya, kendala tersebut terutama masalah pendanaan. Dalam kebijakan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% baik dari APBN maupun dari APBD, namun dalam pelaksanaannya tidak semua daerah mampu memberikan dana sebesar itu dari alokasi anggaran yang ada, sekalipun ada juga nilainya kecil sehingga kemampuan dana yang digunakan untuk pelayanan bidang pendidikan sangat kurang.

Upaya untuk mengatasi berbagai masalah maupun kekurangan dalam pelayanan pendidikan, maka pemerintah dalam hal ini mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pendidikan. Efektivitas peran masyarakat dalam hal ini baik sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Salah satu peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan adalah peran dalam meningkatkan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan Sekolah. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akmal (Priansa dan Garnida, 2013:10) menyatakan bahwa “efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right things*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil”.

Komite Sekolah sebagai lembaga non-struktur merupakan pendamping kelembagaan pendidikan yang berada pada satuan pendidikan, sebagaimana yang ada di SD Negeri 1 Maibua. Penyelenggaraan fungsi Komite Sekolah sebagaimana telah

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April 2002, memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pendidikan terutama untuk peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang. Sehubungan dengan efektivitas peran Komite Sekolah, Ervan Yusuf Sadewa, dan Tri Yuningsih (2016:1) mengutarakan bahwa “dibutuhkan perbaikan *supporting agency* dengan cara mensosialisasikan kepada pihak wali murid mengenai pentingnya rapat dan jajak pendapat, Komite Sekolah diharapkan melakukan kerjasama yang lebih luas, membuka komunikasi kepada masyarakat menengah ke atas dan dunia usaha untuk berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian memperbaiki peran *controlling agency* dengan cara memperbaiki komunikasi dengan berbagai pihak khususnya Pengurus Komite dan pihak sekolah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di sekolah”.

Salah satu upaya Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat khususnya masalah pembiayaan pendidikan, tanpa harus tergantung pada pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui APBN nya dan pemerintah daerah melalui APBD nya yang tidak akan pernah mencukupi kebutuhan-kebutuhan pada satuan lembaga pendidikan (Kompri, 2014: 360).

Peran sekolah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk berperan dalam peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dukungan tenaga, sarana prasarana pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi kabupaten/kota tidak mempunyai hubungan hierarkis. Menurut Khaeruddin (2007),



Komite Sekolah merupakan “suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan madrasah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan” Nurhasanah R, dkk (2021:24-25) menjelaskan bahwa “untuk dapat melaksanakan perannya, Komite Sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah perencanaan program atau dalam hal ini komite sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Anita Putri Pertiwi (2018:80-81) dalam penelitiannya berjudul “Efektivitas Peran Komite Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri se-Jakarta Utara”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan peran Komite Madrasah Aliyah Negeri 5 Jakarta diperoleh tidak efektif hal ini dilihat dari pengaplikasian peran komite sebagai pemberi pertimbangan, menggalang dana, mengawasi pelayanan dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Sedangkan untuk pelaksanaan peran komite di Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta diperoleh hasil cukup efektif hal ini terlihat bahwa komite di Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta menjalankan peran sebagai pemberi pertimbangan, menggalang dana, mengawasi pelayanan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penelitian relevan tersebut mengindikasikan bahwa tidak mudah mewujudkan peran Komite Sekolah yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas dan kontribusi positif dari keluarga besar sekolah, pihak masyarakat, dan badan usaha/perusahaan.

Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi,

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran komite sekolah agar tujuan dibentuknya komite sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien”. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka Komite pada tingkat pendidikan Lembaga Pendidikan Dasar sebagaimana di Sekolah Dasar Negeri 1 Maibua, Komite Sekolah berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui keikutsertaan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana pengawasan pendidikan yang ada. Meskipun demikian, peranan Komite Sekolah masih sebatas memberikan pertimbangan sarana, rapat-rapat pertemuan dengan para guru, dan wali peserta didik.

METODE

Penelitian ini berlokasi di SD Negeri 1 Maibua, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Dasar penelitian adalah Survei yakni mengumpulkan data secara langsung di lapangan menggunakan tipe penelitian deskriptif, yakni mendeskripsikan segala fakta yang berhubungan dengan objek penelitian tentang penyelenggaraan Komite Sekolah.

Populasi penelitian meliputi seluruh Guru, Kepala Sekolah, Pengurus, dan Anggota Komite Sekolah yang ada di SD Negeri 1 Maibua. Jumlah populasi sebanyak 24 orang. Populasi bersifat heterogen, karena itu penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Teknik tersebut merupakan teknik untuk mendapatkan sampel dengan memilih informan yang dipandang paling mengerti mengenai masalah penelitian, sehingga kemungkinan informan dapat menjadi pilihan sesuai dengan kriteria yang mendukung data penelitian, yaitu tentang efektivitas peran Komite Sekolah. Dengan menetapkan jumlah sampel 20% dari populasi yang ada. Berdasarkan perhitungan tersebut,



maka diperoleh sampel sebanyak 5 orang. Selain diperoleh dari responden, informasi tentang data diperoleh melalui informan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data berupa pernyataan yang diberikan oleh responden atau data bersifat nominal. Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka terdiri atas data jumlah siswa, guru, dan berupa angka lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden meliputi data tentang penyelenggaraan Komite Sekolah meliputi peran yang dilaksanakan, bantuan yang telah diberikan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh terutama dari sekolah setempat, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli. Data ini meliputi data keadaan guru, keadaan sekolah, keadaan siswa, dan data mengenai anggota Komite Sekolah.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk mengetahui penyelenggaraan Komite Sekolah. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada responden maupun informan berkaitan dengan penyelenggaraan Komite Sekolah. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung peran yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah.

Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data secara kategorisasi dan selanjutnya masing-masing kategori diberi bobot persentase sesuai dengan kejadian yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, Dewan Pendidikan bertujuan untuk (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Mulyono, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut, Haryadi (2010:17) menjelaskan bahwa “peranan Komite Sekolah secara umum dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan; (2) pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (4) *mediator* antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan”.

Berdasarkan peran Komite Sekolah sebagaimana dipaparkan di atas, maka untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsinya didasarkan pada peran tersebut. Dwijiwiyoto (2004:179), mengemukakan bahwa “tingkatan efektivitas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 1) Efektif, jika semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terpenuhi dan berjalan dengan baik. 2) Cukup efektif, jika ada salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada yang tidak terpenuhi. 3) Tidak efektif, jika



tidak ada satupun dari faktor yang mempengaruhi implementasi itu terpenuhi”. Adapun indikator dalam penelitian ini terdiri atas peran Komite Sekolah. Soekanto (2007:213) mengungkapkan “tidak ada peran tanpa adanya kedudukan atau kedudukan tanpa peran”. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mempertimbangan kebijakan pendidikan, pendukung finansial, pemikiran maupun ketenagaan, sebagai pengontrol (pengawas) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Saidah, 2016:1). Senada dengan pernyataan tersebut, Sudarwan Danim (2010:2) mengutarakan bahwa “pendidikan juga adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan”.

Tanggapan responden mengenai peranan Komite dalam penentuan kebijakan sekolah (pendidikan) menunjukkan bahwa pada umumnya responden menilai peranan Komite Sekolah di SD Negeri 1 Maibua terlihat cukup berperan yang mana hal ini ditegaskan oleh responden yang menyatakan cukup berperan (38,1%) dan sangat berperan dikemukakan oleh sekitar 23,8% dari seluruh responden yang ada.

Sejalan dengan tanggapan responden di atas, memang tampak bahwa Komite Sekolah yang ada di SD Negeri 1 Maibua cukup aktif dalam melaksanakan fungsinya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah dari hasil wawancara sebagai berikut, dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan sekolah Komite Sekolah selalu dilibatkan baik dalam kapasitasnya memberikan saran-

saran atau gagasan-gagasan yang dapat mendukung pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, dan yang paling sering terjadi anggota Komite Sekolah memiliki keterlibatan yang sangat tinggi dalam perumusan kebijakan mengenai penetapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Berkaitan dengan perumusan kebijakan sekolah yang melibatkan pengurus Komite Sekolah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan baik pengajar maupun peserta didik. Dalam penentuan kebijakan tersebut Komite Sekolah perannya hanya sebatas pada proses penyelenggaraan pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan. Sementara kebijakan mengenai kurikulum sekolah atau mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, dalam hal ini tetap ditentukan oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Tanggung jawab Komite Sekolah dalam hal ini memberi support atau dukungan supaya penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan masyarakat.

Meskipun masih ada responden yang menilai bahwa peranan Komite Sekolah masih kurang (11,1%) bahkan tidak berperan sama sekali itu tampak pada penilaian 7,9% responden yang menilai kurang dan sangat kurang, dan lainnya menyatakan keterlibatan sedang (19,0%). Penilaian tersebut karena melihat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan sekolah yang juga diikuti oleh pengurus Komite Sekolah biasanya anggota Komite (Pengurus) tidak semua menghadiri. Oleh karena itu, kadangkala menyebabkan kurangnya gagasan yang diperoleh pimpinan sekolah dalam melaksanakan proses manajemen sekolah kedepan.



Melihat fungsi dari Komite Sekolah dalam hal memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 1 Maibua. Realisasi dari peranan komite sekolah ini pada dasarnya melihat dalam hal pemberian dukungan finansial maupun dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, serta keterangan.

Penilaian responden mengenai dukungan Komite Sekolah dalam bentuk finansial kepada sekolah (satuan pendidikan) yang ada di SD Negeri 1 Maibua. Sebagaimana yang tampak penilaian responden umumnya menyatakan mendukung. Penilaian ini berkisar 27,0% menyatakan cukup mendukung, dan 19,0% menyatakan dukungannya sedang.

Mencermati penilaian responden di atas sebagaimana hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh fakta bahwa dukungan yang diberikan oleh Komite Sekolah adalah dalam bentuk finansial, hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah.

Setiap tahun ajaran baru (Kepala Sekolah, dan Dewan Guru) bersama-sama dengan Komite Sekolah merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam hal ini penetapan perkiraan biaya yang diperlukan oleh sekolah selama satu tahun kedepan. Pada saat ini ditetapkan kebijakan mengenai uang Komite Sekolah yang harus dibayarkan oleh peserta didik.

Besarnya biaya partisipasi pendidikan yang harus dibayarkan peserta didik sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tua peserta didik. Hasil wawancara dengan Ketua Komite SD Negeri 1 Maibua tentang biaya tetap diberikan standar misalnya yang ada di sekolah ini adalah Rp. 5.000,- dan tidak ada batasan bagi yang akan memberikan lebih. Namun, untuk keteraturan administrasi penerimaan dana dari orang tua, maka besarnya sumbangan

yang disetujui bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan, triwulan, semester atau sekaligus dalam satu tahun sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tua/wali peserta didik. Meskipun demikian, penetapan itu terlebih dahulu harus melalui kesepakatan orang tua/wali peserta didik.

Berkaitan dengan dukungan finansial yang diberikan oleh Komite Sekolah, terlihat belum mampu mencukupi kebutuhan sekolah terutama dalam melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk dalam penyediaan ketenagaan misalnya dalam mengatasi kekurangan guru. Keterbatasan tersebut disebabkan karena jumlah dukungan finansial yang diberikan oleh orang tua/ wali peserta didik masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Namun, situasi ini sangat dilematis karena disatu sisi pihak sekolah bersama dengan Komite Sekolah tidak dapat menaikkan besaran jumlah dana partisipasi masyarakat karena sangat rentan mendapatkan kritikan. Keadaan demikian itu juga terjadi karena kemampuan ekonomi masyarakat sebagian besar masih rendah. Sementara pada sisi yang lain bagi orang tua/wali peserta didik yang memiliki kemampuan secara ekonomi lebih besar, masih terlihat kecil jumlah sumbangan atau partisipasinya terhadap pendanaan sekolah.

Komite Sekolah di SD Negeri 1 Maibua hanya mengharapkan pendanaan dari partisipasi orang tua/wali peserta didik, belum ada bentuk partisipasi atau sumber finansial alternatif, misalnya dukungan masyarakat dari kalangan dunia usaha atau donatur tetap yang memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang ada. Dengan keadaan seperti ini menyebabkan keterbatasan dana dalam pengelolaan sekolah. Padahal dengan dukungan finansial alternatif sangat membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas peserta didik.



Kelemahan yang terlihat dari tidak adanya dukungan finansial alternatif yang diperoleh Komite Sekolah dari masyarakat, hal itu disebabkan karena para pengurus Komite Sekolah masih kurang memahami dengan baik fungsi dari Komite Sekolah itu sendiri. Selain daripada itu, waktu yang disediakan serta kepedulian pada pengembangan sekolah terlihat masih kurang optimal. Keadaan demikian itu dapat dilihat antara lain keaktifan pengurus Komite Sekolah nanti pada saat ada pertemuan atau rapat-rapat, namun setelah kegiatan itu selesai, juga tidak ada upaya untuk menjembatani kepentingan sekolah dengan masyarakat.

Berkaitan dengan support atau dukungan Komite Sekolah dalam hal finansial, dukungan lain adalah dalam bentuk penyediaan tenaga penyelenggaraan pendidikan. Penyediaan tenaga sangat penting karena SD Negeri 1 Maibua masih memiliki keterbatasan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, khususnya ketersediaan tenaga sesuai bidang keahlian yang dimiliki.

Kemampuan Komite Sekolah dalam menyediakan ketenagaan khususnya dalam memenuhi kebutuhan guru, baik secara kualitas maupun kuantitas terlihat masih rendah atau kurang, keadaan tersebut dapat dilihat dari penilaian responden untuk kategori kurang mampu mencapai lebih dari separuh dari jumlah responden (65,1%) dan yang menyatakan kemampuan sedang hanya 25,4%. Tidak ada satupun responden yang menilai sangat mampu dan cukup mampu. Memperhatikan data tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan Komite Sekolah dalam menyediakan ketenagaan, baik kuantitas maupun kualitas masih sangat rendah. Keadaan itu diketahui karena masih kurangnya guru dari bidang studi ke-pgsd an, sehingga keadaan ini diatasi dengan cara melebihkan jam mengajar beberapa orang guru yang ada. Keadaan ini sebenarnya

kurang baik, karena guru yang memiliki jam mengajar melebihi tugas menyebabkan waktu mereka tersita banyak untuk mengajar dan kurang persiapan dalam menyediakan bahan pembelajaran.

Selain faktor penyediaan ketenagaan dari segi jumlah guru, kemampuan Komite Sekolah ini terbatas karena guru yang direkrut tentu akan memperoleh gaji (honor). Namun, disatu sisi ketersediaan dana yang ada masih sangat terbatas. Keterbatasan penyediaan dari segi kualitas juga sangat kurang seperti terlihat untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar mereka perlu diberikan pendidikan dan pelatihan, namun hal ini tidak pernah dilaksanakan kecuali yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.

Ketidakmampuan Komite Sekolah dalam memberikan dukungan ketenagaan hal itu tidak terlepas dari keterbatasan finansial yang dimiliki untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau kursus-kursus yang diberikan kepada guru-guru. Sebagaimana yang disebutkan di atas, dana yang diperoleh dari masyarakat khususnya sumbangan orang tua/wali peserta didik umumnya digunakan untuk membeli sarana dan prasarana sekolah termasuk yang paling besar adalah yang digunakan untuk kesejahteraan para guru seperti digunakan untuk memberi honor kelebihan jam mengajar maupun dalam bentuk insentif lainnya yang bertujuan merangsang motivasi kerja para guru.

Efektivitas penyelenggaraan Komite Sekolah lain dapat dilihat pada peranannya dalam melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tujuan pengawasan ini pada dasarnya adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.



Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 1 Maibua menunjukkan terdapat 46,0% menyatakan cukup baik dan 23,0% lainnya menyatakan sedang. Sementara itu hanya 7,9 % responden menyatakan sangat baik. Jika diperhatikan penilaian responden tersebut, dapat dikatakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat terlaksana karena dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah senantiasa mendapat pemantauan dari Komite Sekolah, begitu pula dengan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Sekolah terhadap program kegiatan sekolah selalu dilakukan secara berkala. Kemandirian Komite Sekolah menjadikan posisinya sangat strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah. Pengawas atau kontrol yang dilaksanakan di sini baik itu yang menyangkut kontrol finansial, program sekolah, sampai pada bagaimana keterukuran keluaran (produk) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terdapat responden yang menilai bahwa pelaksanaan fungsi kontrol Komite Sekolah belum berjalan dengan baik, juga cukup beralasan karena beberapa aspek yang luput dari pengawasan ini antara lain masih sering terjadi tindakan guru yang tidak melaksanakan tugas dengan baik yang luput dari pantauan Komite, sementara di satu sisi Kepala Sekolah masih sering memihak pada guru sekalipun mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Keterbatasan Komite Sekolah dalam melaksanakan tugasnya tidak lain karena anggota Komite tidak berkantor tiap hari di sekolah. Fungsi lainnya dari Komite Sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraannya adalah sebagai mediator

atau penghubung antara sekolah dengan masyarakat dan pihak eksekutif (pemerintah).

Melihat peranan Komite Sekolah sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat dan pihak eksekutif (pemerintah) tampak penilaian responden sudah menilai cukup baik yang dikemukakan oleh 39,7% dan yang menyatakan sangat baik sekitar 12,7%. Sementara yang menyatakan sedang terhadap 20,6% responden. Berdasarkan penilaian responden tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi komunikasi yang menjembatani antara sekolah dengan pihak masyarakat serta pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Peranan Komite Sekolah sebagai humas (hubungan masyarakat) pada prinsipnya sangat baik karena membangun hubungan yang erat pada tiga pilar atau komponen yang ada, yang masing-masing memiliki kepentingan yang sama dalam mengembangkan pendidikan baik oleh sekolah sendiri sebagai pelaksana, masyarakat sebagai pengguna, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Kegagalan dalam membina hubungan baik pada ketiga komponen tersebut akan berdampak buruk terhadap sekolah itu sendiri. Pentingnya menjalin hubungan baik ini karena upaya untuk memikirkan perkembangan sekolah harus dilakukan secara bersama-sama. Meskipun demikian, masih ada beberapa responden yang menilai bahwa kemampuan komunikasi Komite Sekolah dengan masyarakat secara khusus masih kurang terlaksana dengan baik. Hal tersebut diketahui dari adanya beberapa orang tua peserta didik yang masih rendah partisipasinya terhadap pengembangan pendidikan, dan suara-suara miring dari masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh sekolah. Semuanya itu disebabkan karena saluran komunikasi masyarakat dengan sekolah kurang berfungsi dengan baik, yang sering dilakukan adalah surat dari Komite Sekolah menyangkut



kebijakan yang dibuat, tetapi umpan balik dari masyarakat seperti melalui rapat masih jarang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Peran Komite Sekolah di SD Negeri 1 Maibua cukup efektif. Peran Komite Sekolah dalam hal menjalankan fungsi sebagai pemberi pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sudah berjalan cukup baik. Peran Komite Sekolah dalam hal memberi dukungan finansial, dukungan pemikiran, maupun dukungan ketenagaan tetap ada sekalipun sangat terbatas. Dukungan dalam bentuk finansial sudah ada namun sangat terbatas, karena satu-satunya sumber finansial Komite Sekolah adalah dari iuran orang tua peserta didik. Sumber finansial alternatif seperti dari donatur tetap belum ada. Adapun untuk dukungan ketenagaan khususnya dalam pengembangan kualitas guru dan pemenuhan kebutuhan jumlah guru belum mampu dilakukan oleh Komite Sekolah.

Implementasi fungsi Komite Sekolah sebagai lembaga kontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah terlaksana dengan baik, khususnya dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Dalam hal ini termasuk penggunaan dana dari sumber-sumber lain sudah berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaan tugas-tugas guru masih dominan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah. Peranan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan fungsi kehumasan atau sebagai penghubung kepentingan sekolah dengan masyarakat dan pemerintah sudah terlaksana, namun belum

optimal. Hal tersebut disebabkan masih adanya masyarakat, khususnya orang tua peserta didik yang belum mengetahui secara mendalam mengenai fungsi dan peranan Komite Sekolah.

SARAN/REKOMENDASI

Perekrutan anggota Komite Sekolah dimasa yang akan datang perlu memperhatikan aspek kualitas, terutama memiliki komitmen besar untuk mengembangkan pendidikan. Dalam hal pembuatan kebijakan seyogianya Komite Sekolah perlu mengadakan musyawarah yang tidak hanya melibatkan anggota Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan para guru semata. Namun, dibutuhkan keterlibatan dari masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peranan dan fungsi Komite Sekolah. Selain itu, diharapkan Komite Sekolah memotivasi masyarakat dan kalangan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif menjadi donatur, khususnya di wilayah Desa Maibua Kecamatan Lampasio.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Madako Tolitoli yang telah memberikan surat tugas penelitian. Terimakasih kepada Keluarga Besar SD Negeri 1 Maibua yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendukung serta memberikan informasi maupun data empirik dalam penelitian ini. Terimakasih kepada Lembaga Pengelola dan Publikasi Jurnal 12 Waiheru.



DAFTAR PUSTAKA

- Anita Putri Pertiwi. (2018). Efektivitas Peran Komite Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri se-Jakarta Utara. Jakarta: Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43371/1/ANITA%20PUTRI%20PERTIWI-PPS.pdf>.
- Danim, Sudarwan. (2010). *Pengantar Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dwijowijoto, Rian Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media komputindo.
- Haryadi, Yadi, dkk. (2010). *Pemberdayaan Komite Sekolah: Bahan Pelatihan untuk Fasilitator Inti Komite Sekolah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Modul Penguatan Lembaga Komite Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan Depdiknas RI.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Penyelenggaraan Fungsi Komite Sekolah.
- Khaeruddin. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Kompri. (2014). *Manajemen Sekolah Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyono. (2010). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Priansa, Donni Juni, dan Garnida, Agus. (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- R, Nurhasanah, dkk. (2021). Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal MAPPESONA*, 3(1), 24-25. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1770>.
- Sadewa, Eryan Yusuf, dan Yuniningsih, Tri. (2016). Efektivitas Peran Komite Sekolah di SD Negeri 1 Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11077/10746>.
- Saidah, U. H. (2016). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.